
ANALISIS PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018-2020

Oleh

Dian Sabrina Syaharni¹, Erika Gustian Fauzi², Salsabilah Sirait³

¹²³Universitas Internasional Batam

E-mail: ¹2041257.dian@uib.edu, ²2021258.erika@uib.edu,

³2041259.salsabilah@uib.edu

Article History:

Received: 19-12-2021

Revised: 15-01-2022

Accepted: 23-01-2022

Keywords:

PDRB, Penurunan, Lapangan Usaha

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Kepulauan Riau. Data sekunder yang digunakan adalah data periode pada tahun 2019-2021. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode pengumpulan data dengan memanfaatkan studi pustaka dengan mencari acuan dari beberapa sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan hampir di seluruh sektor lapangan usaha dari tahun ke tahun. Khususnya pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan laju pertumbuhan menurun secara signifikan.

PENDAHULUAN

Bermula dari awal target dari pelimpahan wewenang kekuasaan melalui otonomi daerah diantaranya meningkatnya masyarakat yang sejahtera, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Meningkatnya masyarakat yang sejahtera diharapkan dapat diwujudkan dengan cepat melalui pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Dengan potensi keistimewaan, keberagaman, serta sumber daya daerah yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, pelaksanaan otonomi daerah harapan untuk meraih kedudukan yang diharapkan belum juga tercapai. Merujuk pada pengalaman negara lain, satu dasawarsa lebih seharusnya menjadi titik waktu pengalihan tahap transisi ke konsolidasi desentralisasi. Namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi yang dicapai dalam wujud otonomi daerah malah tidak memperlihatkan kemajuan yang diinginkan, yang dilihat belum juga bermanfaat untuk masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah diyakini sebagai jalan terbaik dalam memperkuat demokrasi lokal dan bahkan nasional, menumbuhkan efisiensi pelayanan publik dan kapasitas teknokrasi negara, mendukung realokasi nilai, kekuasaan, dan sumber daya ekonomi, serta pembangunan terakselerasi yang lebih berkualitas.

Namun demikian, masih sedikit daerah otonom yang telah secara tetap merancang,

menentukan, dan mengimplementasikan suatu strategi peningkatan potensi ekonomi lokal. Beberapa studi ilmiah dan laporan media massa bahkan mengekspos fenomena yang cukup mengkhawatirkan terhadap cita-cita otonomi daerah. Dalam kerangka desentralisasi ekonomi, peningkatan ekonomi lokal merupakan suatu ketidakpastian. Hal ini dikarenakan sulit sekali mengharapkan suatu peningkatan ekonomi yang dapat memadai dengan potensi dan kebutuhan daerah jikalau distingsi sentralistis masih terlalu kental.

Dalam teori ekonomi memaparkan bahwa ide desentralisasi ekonomi itu tidak lain adalah tuntutan kemampuan dan skala ekonomi yang lebih merata antara pusat dan daerah, sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial khususnya skala yang lebih makro. Salah satu daerah yang merupakan hasil pemekaran adalah Provinsi Kepulauan Riau, di mana wilayah ini adalah daerah otonom yang diharapkan menjadi model berkaitan dalam peningkatan perekonomian dengan adanya wilayah ekonomi khusus.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan guna mengetahui lebih lanjut mengenai (1) bagaimana perkembangan PDRB per sektor lapangan usaha pada tahun 2018-2020 di Provinsi Kepulauan Riau? dan (2) Sektor lapangan usaha apa yang perlu ditingkatkan guna menekan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau?.

LANDASAN TEORI

Dalam konsep ekonomi pembangunan suatu wilayah atau regional baik pada nasional, provinsi maupun kota atau kabupaten potensinya dapat diukur. Salah satunya yang penting adalah pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB) dan pendapatan per kapita serta struktur ekonomi sektoral yang lebih modern.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan penduduk (Mujib, 2005)

Jufri (2020) menyatakan bahwa PDRB adalah nilai suatu produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan untuk pembangunan suatu wilayah tertentu dengan mengukur harga yang ditetapkan sebagai indikasi nilai tambah produk yang dijual di pasar per tahun dan nilainya berupa nilai tambah. Dari model pendapatan regional dapat digunakan untuk mengkaji peraturan stabilisasi regional atau daerah. Karena pengeluaran pemerintahan dalam tingkatan manapun adalah salah satu variabel-variabel pengeluaran otonom, maka konsep ini pun dapat dimanfaatkan dalam menganalisis implikasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tingkat pengeluaran pemerintah secara menyeluruh dan penyebarannya secara regional.

Namun, perbedaan utama selama menganalisis pertumbuhan ekonomi nasional dan menganalisis pertumbuhan daerah terletak pada analisis tersebut berfokus pada penggantian faktor-faktor ekonomi. Sulit membayangkan perekonomian tertutup di berbagai daerah, asumsi ini tidak bisa diterapkan pada perekonomian daerah, terutama di dalam suatu negara.

Konsep ini merupakan bentuk model pendapatan daerah sederhana dari teori dasar ekspor yang pertama kali dikemukakan oleh Tiebout. Teori ini merupakan penyederhanaan dari sistem wilayah, yaitu wilayah sebagai objek penelitian dan wilayah di atasnya, dan aktivitas produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu wilayah dibagi menjadi departemen dasar dan departemen non-dasar (Jaya Aziz, p. 1994).

Kegiatan dasar merupakan kegiatan eksogen, artinya tidak ada kaitannya dengan

kondisi internal perekonomian daerah, dan juga berperan dalam meningkatkan keefisienan jenis pekerjaan lain. Kegiatan non basis merupakan kegiatan untuk memenuhi keinginan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, peningkatannya tergantung pada kondisi ekonomi wilayah secara menyeluruh. Artinya sektor tersebut bersifat endogen (tidak bisa tumbuh bebas). Peningkatannya tergantung pada keadaan ekonomi wilayah tersebut secara keseluruhan. Dengan kata lain, sektor ini bersifat endogen.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang diterapkan guna menganalisis penelitian ini ialah data sekunder, dimana data tersebut sudah tercatat dan di terbitkan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, khususnya data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan pedoman, ataupun peraturan, kebijakan serta perundang-undangan terkait lainnya atau sumber data dari instansi terkait ataupun dari beberapa hasil analisis literatur yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga data lebih bersifat tertulis (Utami, 2020). Data didapat dari Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

Dalam menganalisis penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka atau dengan mencari acuan dari berbagai sumber, antara lain *website*, jurnal, maupun artikel penting untuk penelitian terkini.

Kemudian, untuk melihat seberapa besar potensi atau kapasitas ekonomi yang menjadi kontribusi paling utama akan kegiatan perekonomian suatu daerah yaitu dengan cara mempertimbangkan parameter-parameter ekonomi wilayah Kepulauan Riau dengan beberapa pulau di daerah atau regional di atas secara nasional.

Kaidah ini tidak hanya diimplementasikan dan berfaedah bagi daerah tingkat kabupaten saja, melainkan juga dapat diimplementasikan untuk menganalisis potensi ekonomi suatu provinsi yang direncanakan menjadi otonom atau suatu wilayah yang berbatasan dengan suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat pencapaian indikator ekonomi makro tidak hanya merupakan kinerja perekonomian nasional, tetapi juga kinerja perekonomian bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat dan swasta. Hal ini terkait dengan paradigma baru pemerintah daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur capaian ekspansi yang telah dilaksanakan. Parameter ini juga dapat digunakan untuk menetapkan arah kebijakan ekspansi ke depannya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena laju pertumbuhan populasi lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Bila melihat secara umum struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selalu didominasi kelompok tersier, kemudian primer, dan terakhir sekunder.

Guna mendalami permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik secara agregat dan menurut lapangan usaha selalu menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan. Hal ini sangat penting mengingat dengan menggunakan PDRB harga konstan akan

dapat memberikan secara riil perubahan produksi.

Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara riil suatu daerah akan diperoleh dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan sebagai indikator perekonomian suatu daerah atau wilayah.

Perencanaan pembangunan tentunya memerlukan berbagai data untuk menentukan dan mengarahkan pembangunan, sehingga dapat mencapai tujuan. Salah satu data yang diperlukan adalah PDRB untuk mengetahui potensi dan landasan perekonomian untuk melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi, serta melakukan penilaian untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Salah satu indikator penting PDRB adalah memahami tingkat produk yang dihasilkan oleh semua faktor produksi di suatu wilayah tertentu, besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi suatu periode waktu tertentu.

Banyak sektor-sektor yang mengalami penurunan yang signifikan apabila dilihat dari sisi lapangan usaha. Hanya sektor Informasi dan Komunikasi yang mengalami kenaikan. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu turun 9.95% pada tahun 2019 kemudian turun menjadi -41.01% pada tahun 2020.

Sektor lain juga mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun menjadi -4.39%, sedangkan tahun sebelumnya -0.70%. Sektor pertambangan dan penggalian turun menjadi -4.17%, sedangkan tahun sebelumnya 0.16%. Sektor industri pengolahan mengalami kenaikan menjadi 6.25% pada tahun 2019 dan terus turun pada tahun 2020 menjadi 3.25%. Dan terakhir sektor jasa yang mengalami pertumbuhan 5,44 persen pada tahun 2018 terus meningkat pertumbuhannya pada tahun 2020 menjadi 7,50 persen.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1	Pertanian , Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-3.16	-0.70	-4.39
2	Petambangan dan Penggalian	1.35	0.16	-4.17
3	Industri Pengolahan	4.14	6.25	3.25
4	Pengadaan Listrik, Gas	-1.32	3.30	-4.38
5	Pengadaan Air	1.07	-0.06	-2.78
6	Konstruksi	7.93	8.23	-6.40
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.28	6.10	-12.72
8	Transportasi dan Pergudangan	0.91	-8.87	-40.23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.17	9.95	-41.01
10	Informasi dan Komunikasi	10.71	11.84	16.55
11	Jasa Keuangan	5.77	4.82	-3.10
12	Real Estate	-0.37	0.12	-8.33

13	Jasa Perusahaan	6.84	-8.82	-41.88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.00	1.52	7.97
15	Jasa Pendidikan	1.32	0.44	-8.20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.04	2.78	-2.05
17	Jasa Lainnya	18.40	0.86	-68.83
18	PDRB	4.47	4.84	-3.80
19	PDRB TANPA MIGAS	6.11	5.57	-3.78

Sumber: BPS PDRB Provinsi Kepulauan Riau

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis potensi ekonomi pada daerah untuk mengetahui sektor basis dan sektor berdasarkan nilai dalam studi kasus Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa walaupun satu sisi sektor Informasi dan Komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kenaikan pertumbuhan, namun untuk sektor lainnya seperti Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Petambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, PDRB, PDRB Tanpa Migas yang seharusnya memperoleh perhatian serius untuk terus ditingkatkan, khususnya pada sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami penurunan yang signifikan. Perkembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan suatu bagian dari kawasan ekonomi karena pemanfaatannya belum optimal dari kondisi dan letak geografis bagi ekspansi dan kemajuan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jufri, F. a. (2020). ANALISIS KONTRIBUSI SUBSEKTOR PETERNAKAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN PASER. *Jurnal Magrobis* 20, no. 1, 131-139.
- [2] Saerofi, M. (2005). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL DI KABUPATEN SEMARANG. Universitas Negeri Semarang.
- [3] Utami, R. a. (2020). Unmet Need Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data SDKI 2017. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 3, no. 1, 85-91.
- [4] Jaya Aziz, Iwan. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN